

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

PT Newmont Nusa Tenggara merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang memiliki induk perusahaan di Amerika Serikat. Perusahaan ini berlokasi di Sumbawa, provinsi NTB. PT Newmont bergerak di bidang pertambangan tembaga dan emas. Yang mana saham dari perusahaan ini merupakan saham gabungan dari beberapa pengusaha lokal dan asing. Perusahaan ini bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dengan menandatangani nota kesepakatan kerja dalam kontrak karya.

PT Newmont yang memproduksi bahan mentah tembaga yang masih berupa konsentrat, dimana dalam melakukan pemurniannya perusahaan ini mengekspor bahan mentahnya ke beberapa Negara seperti ke perusahaan induknya di AS dan China. Melihat adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini membuat pemerintah membuat beberapa kebijakan. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan yang dirasa diperlukan guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan Negara. Salah satu peraturan pemerintah dalam menerapkan perannya adalah diberlakukannya UU minerba nomor 4 tahun 2009 yang berisi tentang pelarangan ekspor konsentrat / bahan mentah dan mewajibkan setiap perusahaan membangun smelter. Yang mana pembangunan smelter ini akan meningkatkan investasi dalam negeri karena fasilitas smelter yang ada saat ini masih terbatas. Peraturan ini ditetapkan melalui pertimbangan

agar tercipta nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Namun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ditolak oleh PT Newmont karena dalam pembangunan smelter bukanlah perkara yang mudah. Ada beberapa alasan yang mendukung PT Newmont dalam membangun smelter yaitu yang pertama, terbatasnya dana karena pembangunan smelter membutuhkan dana yang tidak sedikit, kedua kesiapan infrastruktur daerah yang akan di bangun smelter dan yang ketiga adalah cadangan mineral yang ada di Indonesia. dalam hal ini pemerintah tetap akan memberlakukan kebijakannya dan melarang setiap perusahaan tambang mengekspor bahan mentahnya serta diwajibkan membangun smelter.

PT Newmont tetap bersikeras dalam menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh Newmont dalam mempengaruhi kebijakan ini yaitu PT Newmont mengajukan gugatan arbitrase terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu perusahaan ini juga menghentikan produksi dan merumahkan sebagian besar karyawannya. PT Newmont memberikan syarat kepada pemerintah apabila Newmont ingin mencabut gugatannya dan segera melakukan produksi maka pemerintah harus mencabut kebijakannya.

Dalam penyelesaian masalah ini pemerintah terus melakukan diplomasi dengan PT Newmont. Sehingga setelah melakukan diplomasi panjang akhirnya PT Newmont mencabut gugatannya dan tetap memberikan izin kepada Newmont untuk mengekspor bahan mentah hingga tiga tahun kedepan mulai tahun 2014.

Izin yang diberikan pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan PT Newmont dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang mana CEO perusahaan Newmont mendatangi menteri ekonomi untuk melakukan lobi langsung. Dalam pertemuannya PT Newmont berkomitmen tentang keseriusannya dalam membangun smelter dengan menginvestasikan dana sebesar 25% kepada pemerintah. Selain lobi melalui CEO PT. Newmont, pemerintah Amerika juga memberikannya melalui bantuan negosiasi melalui kedutaan besar Amerika yaitu Blake untuk dapat berkomunikasi secara diplomatic dengan menteri perekonomian Indonesia. Melalui lobi tersebut pemerintah Amerika juga melangsungkan lobinya melalui lembaga independen yaitu Brooks untuk mendekati para petinggi Indonesia.

Pemerintah Indonesia kemudian membuat peraturan pemerintah (PP) yang berisi bahwa perusahaan tambang tembaga tetap boleh melakukan ekspor konsentrat selama proses pembangunan smelter berlangsung yaitu tiga tahun setelah kebijakan UU minerba di terapkan.